



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-548/PK/2019 19 November 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD
Kemendagri No.973/5977/Keuda Tanggal 4 November 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/5977/Keuda tanggal 4 November 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 5 (lima) raperda yang tidak diproses yaitu:

No.	Prov/Kab/Kota	Tentang	Keterangan
1.	Kab. Wakatobi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	<i>Softcopy/Hardcopy</i> raperda tidak disampaikan
2.	Kab. Wakatobi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<i>Softcopy/Hardcopy</i> raperda tidak disampaikan
3.	Kab. Wakatobi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	<i>Softcopy/Hardcopy</i> raperda tidak disampaikan
4.	Kab. Wakatobi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	<i>Softcopy/Hardcopy</i> raperda tidak disampaikan
5.	Kab. Wakatobi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	<i>Softcopy/Hardcopy</i> raperda tidak disampaikan

2. Adapun 1 (satu) raperda yaitu raperda Kab. Wakatobi tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2017 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

3. Hasil penelaahan terhadap 1 (satu) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).

4. Dalam...

4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.nDirektur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan :
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Wakatobi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	-	-	Tidak diproses, <i>Softcopy/Hardcopy</i> raperda tidak disampaikan
2	Kab. Wakatobi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	Tidak diproses, <i>Softcopy/Hardcopy</i> raperda tidak disampaikan
3	Kab. Wakatobi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	-	-	Tidak diproses, <i>Softcopy/Hardcopy</i> raperda tidak disampaikan
4	Kab. Wakatobi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	Tidak diproses, <i>Softcopy/Hardcopy</i> raperda tidak disampaikan
5	Kab. Wakatobi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	Tidak diproses, <i>Softcopy/Hardcopy</i> raperda tidak disampaikan
6	Kab. Wakatobi	Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan	-	√	Selesai